

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melansir dari Britannica, Demokrasi merupakan pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Istilah ini bersumber dari *dēmokratia* Yunani, yang berasal dari *dēmos* yang memiliki arti rakyat dan *kratos* yang memiliki arti aturan/pemerintahan. Demokrasi merujuk kepada metode pemerintahan yang dilakukan di negara kota Yunani contohnya Atherna (Dahl, 2021). Menurut Heru Nugroho demokrasi merupakan sesuatu tata cara penyusunan kelembagaan agar mencapai pada keputusan politik, dimana individu mencapai kekuasaan guna mengambil keputusan dengan perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara (Nugroho, 2012). Diambil dari Council of Europe, demokrasi diambil dari kata Yunani "demos", yaitu rakyat, serta "kratos" yaitu kekuasaan; sehingga demokrasi merupakan "kekuatan rakyat": metode pemerintahan yang bergantung pada kehendak rakyat. Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan, dimana semua tindakan yang dilakukan pemerintah berorientasi kepada rakyat, baik dari proses maupun hasil.

Demokrasi memiliki sejarah yang panjang. Seorang sterling profesor Emeritus Ilmu Politik, Universitas Yale dan Penulis *Democracy and its Critics* Robert A. Dahl, berasumsi bahwa demokrasi dalam satu atau lain merupakan suatu konsep yang muncul secara alami yang terdapat pada kelompok yang memiliki

hubungan yang baik seperti suku. Asumsi ini telah didukung oleh penelitian terhadap kelompok suku masyarakat yang tidak bisa membaca, yang menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis sudah ada pada kelompok suku selama ribuan tahun. Bahkan konsep pemerintahan ini sudah ada pada masa manusia bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Transisi pun terjadi dari berburu dan meramu, menjadi menetap di suatu tempat dan mulai bertani dan berdagang. Pada masa ini terjadi ketimpangan kekayaan dan kekuatan militer antar komunitas satu dengan yang lainnya dan peningkatan yang mencolok dalam ukuran dan skala komunitas yang khas. Hal ini pun mendorong penyebaran bentuk organisasi sosial yang hierarkis dan otoriter, yang berimplikasi konsep pemerintahan yang demokrasi pudar. Bentuk pemerintahan yang ada pada masa ini berdasarkan monarki, despotisme, aristokrasi, atau oligarki. Kemudian, sekitar 500 SM, konsep demokrasi kembali muncul. Demokrasi yang ada terbentuk kembali dengan konsep yang lebih baik. Perkembangan paling krusial terjadi di dua wilayah Mediterania, Yunani dan Roma (Dahl, 2021).

Pada abad ke-20, banyak negara pemerintahannya berdasarkan konsep demokrasi, akan tetapi konsep demokrasinya adalah demokrasi perwakilan. Pemerintahan berdasarkan demokrasi menjadi konsep pemerintahan yang berkembang secara masif. Pada awal abad ke-21, para pengamat independen sepakat bahwa lebih dari sepertiga negara-negara yang secara nominal merdeka memiliki lembaga-lembaga demokrasi yang setara dengan negara-negara yang berbahasa Inggris dan negara yang sudah lama menganut sistem demokrasi di benua Eropa. Selain itu, seperenam negara di dunia, pemerintahannya meskipun kurang

baik, namun secara historis menyediakan tingkat pemerintahan demokratis yang tinggi. Secara keseluruhan, negara-negara demokratis dan hampir demokratis ini terdiri dari hampir setengah populasi dunia (Dahl, 2021). Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut bentuk pemerintah ini. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dengan merujuk kepada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat (Saputra, Rohayani, & Salikun, 2017). Oleh karena itu, Pendidikan demokrasi bagi masyarakat sangat penting, karena masyarakat menjadi titik kunci dalam sistem ini.

Pendidikan tentang demokrasi diajarkan dalam Fakultas Ilmu Sosial. Pada mata kuliah umum seperti contohnya diajarkan tentang Pancasila yang didalamnya terdapat nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti laksanakan terdapat sebuah masalah yaitu kurangnya penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Tepatnya pada saat pelaksanaan pemilu untuk memilih ketua umum Badan Legislatif Mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap tidak memakai hak suaranya dalam pemilihan ketua umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ilmu Sosial. Mahasiswa yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial Angkatan. Dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu sebanyak 3796 mahasiswa yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 1868 mahasiswa. Tingkat partisipasi dalam demokrasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial hanya sebesar 49.21%.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat sebuah masalah yaitu terdapat perbedaan *das sein* dan *das soli*, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta mendapatkan pengetahuan tentang demokrasi tapi tidak belum menerapkan demokrasi secara maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Banyak variabel yang mempengaruhi permasalahan yang ada akan tetapi peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya membahas dua variabel dikarenakan keterbatasan peneliti. Peneliti membatasi dengan mengajukan variabel *x* penelitian yaitu pengetahuan demokrasi dan variabel *y* penelitian yaitu perilaku demokratis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2018-2021.

D. Rumusan Masalah

Peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara pengetahuan demokrasi dengan perilaku demokratis mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2018-2021?”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan dapat berguna sebagai sebuah karya ilmiah. Penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya tentang hubungan antara Pengetahuan Demokrasi dengan sikap demokrasi